



Dinamika Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat

Ibrahim^{1*}

¹Pogram Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram,
Indonesia

Email: ibrahimali@ummat.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 03-02-2025, Revised: 16-03-2025, Accepted: 19-03-2025, Published: 31-03-2025

Abstrak

Kemiskinan merupakan tantangan dalam pembangunan social ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dampaknya pada kesejahteraan sosial masyarakat Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di NTB. Metode penelitian menggunakan pendekatan spasial komparatif. Sumber data dari data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di NTB rentang waktu 2010–2024. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat kedalaman mencapai 6.08 Tahun 2022 dan keparahan kemiskinan tertinggi mencapai 1.97 Tahun 2022. Kondisi ini karena di pengaruhi faktor akses geografis, infrastruktur dan bencana gempa dan Covid-19. Kota Mataram memiliki indeks kedalaman terendah mencapai 0.93 Tahun 2021 dan indeks keparahan mencapai 0.19 Tahun 2021. Factor pendukung adanya kemudahan akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan layanan Kesehatan dan masih adanya disparitas ekonomi antar daerah di NTB cukup tinggi. Temuan ini penting melalui pendekatan holistik merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. berbasis data.

Kata Kunci:

dinamika; kemiskinan struktural; siklus kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan; Nusa Tenggara Barat

Abstract

Poverty is a challenge in socio-economic development in West Nusa Tenggara (NTB). Its impact on the social welfare of the community Poverty Depth Index and Severity Index. This study aims to analyze the Poverty Depth Index and Poverty Severity Index in NTB. The research method uses a descriptive quantitative approach. The data source uses secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of NTB for the period 2010–2024. The analysis uses qualitative descriptive. The results of the study show that North Lombok Regency has a depth level of 6.08 in 2022 and the highest poverty severity reaching 1.97 in 2022. This condition is influenced by factors of geographic access, infrastructure and earthquake and Covid-19 disasters. Mataram City has the lowest depth index reaching 0.93 in 2021 and a severity index reaching 0.19 in 2021. Supporting factors include easy access to education, employment and health services and the existence of economic disparities between regions in NTB is quite high. This finding is important in a holistic approach to formulating data-based poverty alleviation policies.

Keywords:

depth index and poverty severity index; dynamics; poverty cycle; structural poverty; West Nusa Tenggara



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental pembangunan ekonomi berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Tidak hanya sekadar mencerminkan jumlah penduduk miskin, kemiskinan mencakup dimensi kedalaman dan keparahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Squared Poverty Gap Index*) menjadi alat ukur penting dalam mengevaluasi tingkat kesenjangan di antara kelompok miskin. Dinamika kedua indeks esensial dalam menilai efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan (Letor, 2021).

Provinsi NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Tren penurunan angka kemiskinan selalu mencerminkan perbaikan kesejahteraan merata di seluruh wilayah. Terdapat kesenjangan antar kabupaten/kota (Priyarsono et al., 2023). Sebagian wilayah mengalami tingkat kemiskinan lebih dalam dan lebih parah dibandingkan lain. Kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan namun manfaatnya masih belum merata. Penting untuk mengevaluasi dinamika Indeks Kedalaman dan Keparahannya kemiskinan guna memahami pola ketimpangan terjadi (Badan Pusat Statistik, 2019; Khasanah, 2021).

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Mengingat semakin tinggi nilai indeks kemiskinan semakin sulit bagi masyarakat miskin keluar dari kemiskinan (Faujiah et al., 2023; Suzuki et al., 2016). Indeks Keparahannya Kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan di antara kelompok miskin. Dimna nilai indeks kemiskinan lebih tinggi bahwa sebagian besar penduduk miskin memiliki tingkat kesejahteraan sangat rendah dibandingkan kelompok lain. Kedua indeks ini tidak hanya mencerminkan jumlah penduduk miskin tetapi kualitas kemiskinan dialami oleh masyarakat di suatu daerah (Apriliani, 2023; Budiman et al., 2023; Mahadiansar et al., 2020).

Beberapa faktor utama memengaruhi dinamika Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di NTB mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Damara et al., 2019; Nabilla et al., 2024; Susila, 2013). Ketimpangan akses terhadap layanan dasar ini menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari lingkaran kemiskinan (Kamaluddin, 2017). Faktor geografis berkontribusi dalam memperburuk ketimpangan, Daerah terisolasi atau terpencil cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dengan daerah memiliki akses lebih baik terhadap pusat ekonomi (Andalisto et al., 2022; Syahza et al., 2018).

Keterbatasan akses terhadap sumber daya sebagai faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di NTB (Khaerani, 2019; Puspaningtyas et al., 2023). Ketergantungan pada sektor ekonomi bersifat subsisten terutama pertanian dan perikanan skala kecil (Nasution, 2012; Winardi, 2017). Penyebab utamanya rendah pendapatan masyarakat miskin. Rendahnya investasi di sektor ekonomi produktif (Muhtarom, 2015). NTB mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi berdampak peningkatan kesenjangan pendapatan.

Ketimpangan ini diperburuk dampak bencana alam gempa bumi tahun 2018 dan pandemi COVID-19. Kondisi ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka secara drastis (Alwi et al., 2022).

Berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pengentasan kemiskinan telah diterapkan (Islami et al., 2024). Banyak program hanya bersifat jangka pendek dan belum memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Program bantuan tunai dan subsidi sering kali tidak tepat sasaran (Idris et al., 2023; Putra et al., 2022). Masih terdapat kelompok rentan tidak terjangkau kebijakan pemerintah. Pemahaman mendalam mengenai dinamika Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan memberikan gambaran tentang ketimpangan ekonomi dioptimalkan mengatasi kemiskinan (Anwar, 2022; Pratiwi et al., 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan indikator kemiskinan kuantitatif (indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan) dengan kerangka teori kemiskinan struktural (Usman, 1994) dan teori siklus kemiskinan (van Wyk & Bradshaw, 2017). Pendekatan ini belum banyak diadopsi dalam penelitian sebelumnya khususnya dalam variabel statistik dengan dimensi social budaya dan intergenerasional kemiskinan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini menganalisis indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di NTB. Kajian terhadap dinamika Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan di NTB menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan berbasis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan di NTB.

Metode

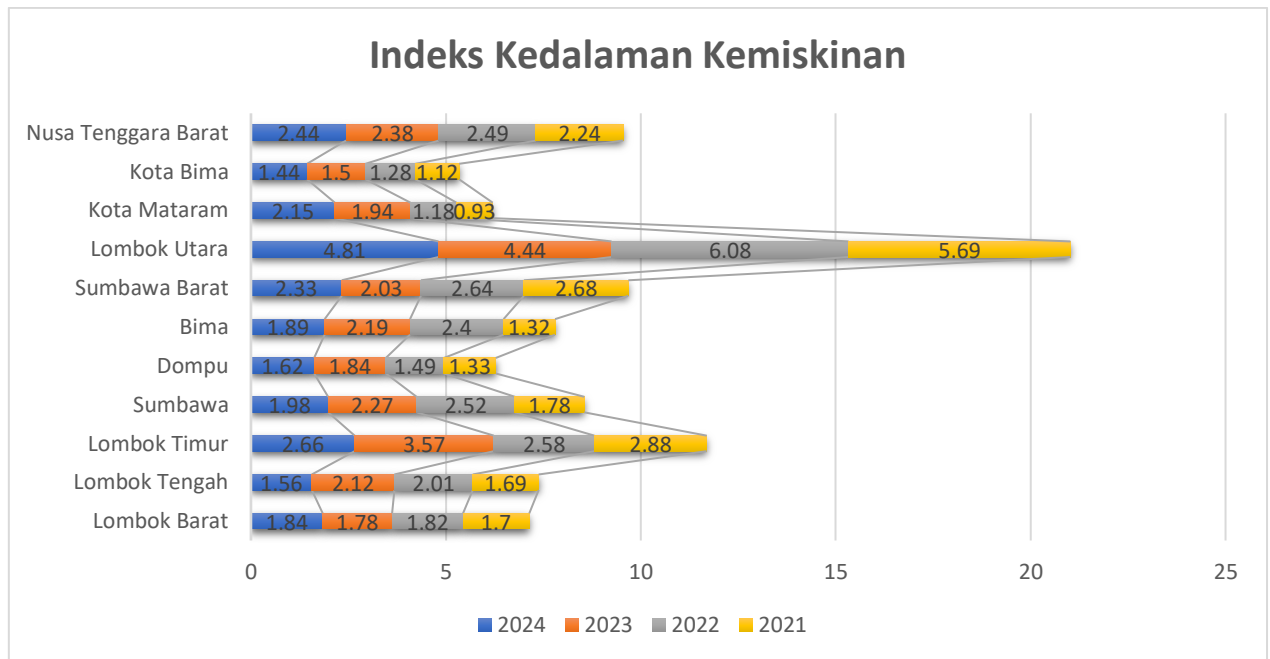
Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial komparatif. Sumber data dari data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan di NTB rentang waktu 2010–2024. Analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori kemiskinan struktural bahwa kemiskinan tidak hanya bersumber dari ketidakcukupan pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan dasar. Teori ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian bahwa kemiskinan sebagai produk dari sistem sosial. Berbeda dengan siklus kemiskinan bahwa rumah tangga miskin sering kali terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus karena keterbatasan modal sosial, ekonomi, dan budaya yang terus direproduksi.

Model pendekatan spasial komparatif menjelaskan interaksi antara determinan struktural dan determinan siklikal terhadap peningkatan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Persebaran data Tingkat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di NTB (Gambar 1 dan Gambar 2).

Tingkat indeks kedalaman kemiskinan di NTB (Gambar 1) menunjukkan adanya disparitas antarkabupaten/kota perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dan ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah.



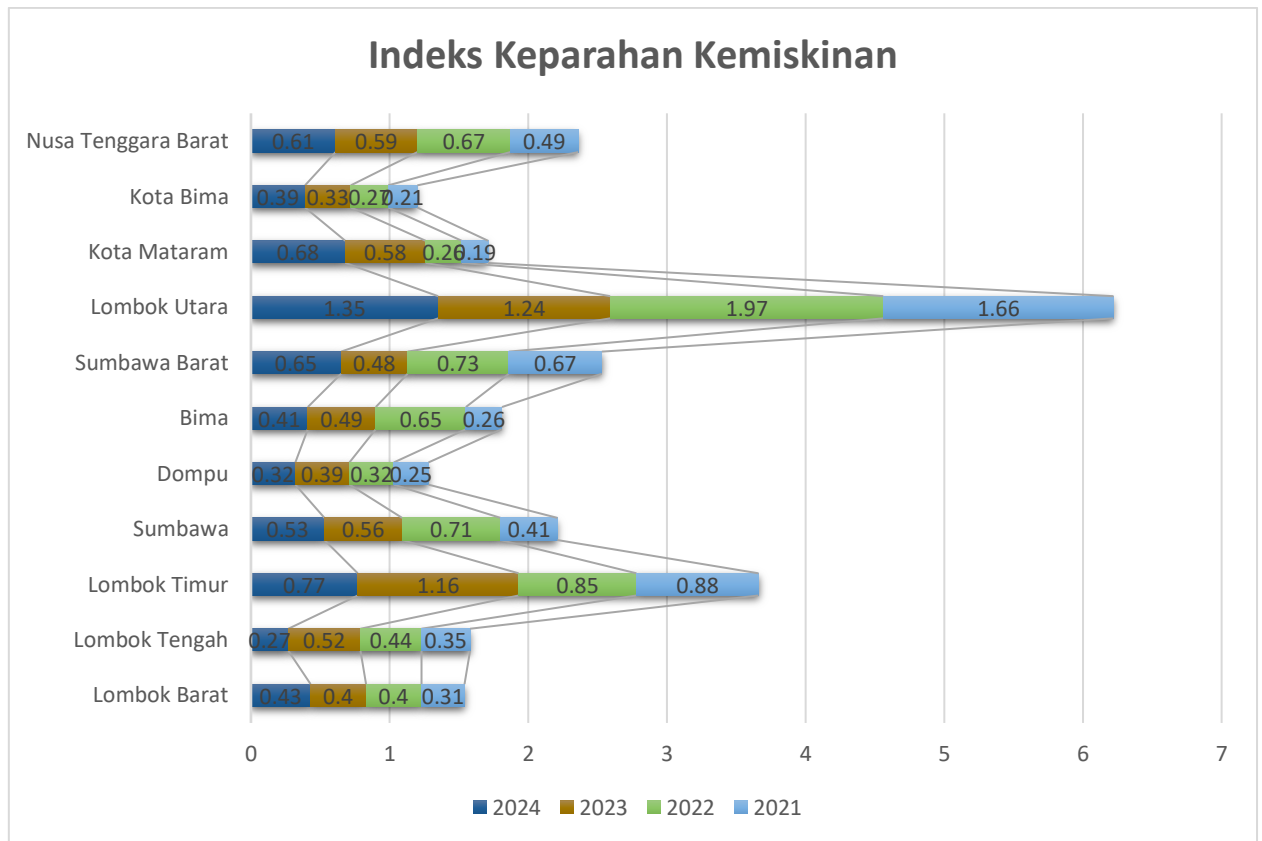
Gambar 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan di NTB
Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 1, indeks kedalaman kemiskinan di NTB dengan mengukur rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Dimana, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Tingkat indeks kedalaman kemiskinan tertinggi pada Kabupaten Lombok Utara indeks 6.08 Tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinannya sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Faktor penyebabnya karena dipengaruhi dampak bencana gempa bumi dan covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian didukung laporan penelitian (Astri et al., 2022) bahwa gempa Lombok berdampak meningkatkan jumlah kemiskinan, dan pengangguran di Kabuapten Lombok Utara, sehingga menghasilkan perekonomian yang tidak normal. Permasalahan ekonomi krisis Covid-19 (Astari et al., 2021) dan Gempa tahun 2018 disusul Pandemi Covid-19 menjadi starting point kondisi sarana Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (Alwi et al., 2022).

Sementara tingkat indeks kedalaman kemiskinan terendah pada Kota Mataram mencapai 0.93 Tahun 2021. Rendahnya kemiskinan Kota Mataram dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB karena kemudahan akses pada lapangan pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Suryati et al., 2019) laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja di Mataram.

Perubahan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa dinamika ekonomi dan kebijakan sosial berperan penting dalam menentukan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di NTB (Gambar 2).



Gambar 2. Indeks Keparahan Kemiskinan
Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 2, Indeks Keparahan Kemiskinan di NTB. Mengingat Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, semakin besar ketimpangan ekonomi di bawah garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan tertinggi pada Kabupaten Lombok Utara mencapai 1.97 Tahun 2022. Kondisi ini adanya ketimpangan antara penduduk miskin lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain. Adanya kelompok sangat miskin memiliki daya beli jauh lebih rendah daripada kelompok miskin lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, didukung laporan penelitian (Wahidin et al., 2022) Kabupaten Lombok Utara adalah daerah relatif tertinggal. Kabupaten ini mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir lebih rendah dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB. Adanya dilema antarlingkungan-sosial, lingkungan-ekonomi, sosial-ekonomi menyebabkan tingginya ketimpangan harga dan distribusi pendapatan antara masyarakat Gili dan non-Gili di KLU (Sutanto, 2017). Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jumlah penduduk miskin di KLU menunjukkan hubeungan berlawanan arah, jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka jumlah penduduk miskin menurun (Alwi et al., 2021).

Dari beberapa data temuan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan diatas yang dilakukan pada penelitian ini tren kemiskinan di NTB tingkat disparitas cukup besar indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan antarkabupaten/kota di NTB. Kota Mataram memiliki tingkat disparitas paling rendah dibandingkan

Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat disparitas paling tinggi. Kondisi adanya keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peran investasi infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta inklusi sosial (Medeiros et al., 2021). Kemiskinan multidimensi regional dan mengidentifikasi kemiskinan secara geografis (Zhou et al., 2022), model autoregresif spasial (SAR) mempunyai dampak terhadap kemiskinan (Liu et al., 2023). Model kemiskinan kemitraan (Ibrahim et al., 2016a, 2016b, 2020). Berdasarkan penelitian ini, dinamika indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, kemiskinan secara geografis, model SAR dan model kemitraan akan memberikan dampak terhadap penyelesaian kemiskinan di tingkat wilayah. Oleh karena itu, diperlukan *good will* dari setiap kepala daerah baru secara serius dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Dampak perubahan indeks terhadap masyarakat miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menjadi indikator penting dalam memahami kondisi masyarakat miskin suatu daerah. Dampak perubahan pada masyarakat sebagai berikut.

1. Ketimpangan Kesejahteraan antarwilayah

Berdasarkan data Gambar 1. Menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan tertinggi pada Kabupaten Lombok Utara mencapai 6,08 tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Kabupaten Lombok Utara memiliki ketimpangan karena jarak antara rata-rata pengeluaran masyarakat miskin dengan garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain. Sementara pada indeks keparahan kemiskinan tertinggi juga berada pada Kabupaten Lombok Utara mencapai 1,97 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan kelompok masyarakat miskin di KLU mengalami kondisi yang lebih kronis dibandingkan kabupaten/kota lain.

Berbeda dengan Kota Mataram mencapai 0,93 tahun 2021 dan Kota Bima mencapai 1,32 tahun 2021 memiliki indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Kota ini memiliki akses ekonomi, peluang kerja lebih banyak dan infrastruktur memadai. Disparitas ini memperjelas bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar dan kesempatan kerja masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dampak ketimpangan antarwilayah diperkuat dengan hasil penelitian (Aprilianti et al., 2021) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kualitas pembangunan daerah dengan mengukur kesejahteraan masyarakat dari dimensi pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Pernyataan ini didukung (Sari et al., 2022) bahwa salah satu strategi pembangunan mengatasi masalah ketimpangan antarwilayah adalah strategi keterkaitan (linkages) antarwilayah. Strategi ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antarwilayah melalui pembangunan berbagai infrastruktur (Simbolon, 2017) dan potensi daerah berbeda baik dari sumber daya alam juga sumber daya manusia maupun teknologi dimiliki dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.

2. Ketahanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Miskin

Perubahan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan berdampak langsung pada ketahanan sosial masyarakat miskin di NTB. Tingkat indeks keparahan kemiskinan tertinggi pada Kabupaten Lombok Utara mencapai 1,24 tahun 2023 dan Kabupaten Sumbawa mencapai 0,41 tahun 2021 artinya bahwa masyarakat miskin mengalami keterbatasan dalam memperoleh gizi cukup dan akses Kesehatan dan pendidikan berkualitas. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi terhadap keluarga miskin sangat berisiko. Dimana anak-anak keluarga miskin berisiko mengalami malnutrisi dan putus sekolah akibat kondisi ekonomi sulit.

Meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan beberapa wilayah di NTB memiliki potensi terjadinya masalah sosial terutama kriminalitas dan konflik sosial. Ketimpangan ekonomi antara daerah terutama perkotaan terutama pada Kota Mataram sebagai pusat ekonomi pertumbuhan dengan daerah perdesaan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa memicu ketidakpuasan sosial dan menurunkan stabilitas sosial.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian (Mustofa, 2012) menunjukkan bahwa ketahanan pangan semakin penting diupayakan dalam rangka mengatasi kerawanan pangan terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Lebih lanjut (Alfiah et al., 2020) menilai bahwa kontribusi perempuan dalam ketahanan keluarga sangat besar dan penting dalam bentuk peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan peran lingkungan sosial, peningkatan kesadaran pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Langkah strategis dilakukan melalui upaya perempuan, ibu rumah tangga, dalam merintis bisnis berbasis media digital menjadi penting. Resiliensi perempuan dalam penguasaan bisnis berbasis komunikasi digital dimotivasi membangun ketahanan ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan membentuk partisipasi ibu rumah tangga dalam bisnis online untuk membantu perekonomian keluarga (Madonna, 2021).

Potensi Pembangunan Daerah

Dinamika indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak hanya berdampak pada masyarakat miskin secara langsung, namun juga mempengaruhi pembangunan daerah secara keseluruhan. Dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tingkat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tinggi mencerminkan bahwa lemahnya daya beli Masyarakat. Kondisi ini berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Mengingat daya beli rendah memiliki pengaruh terhadap permintaan barang dan jasa menurun. Dampaknya menghambat pertumbuhan sektor ekonomi lokal.

Tingkat indeks kemiskinan tertinggi di NTB pada Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa, kondisi ini bahwa pasar lokal kurang berkembang akibat keterbatasan daya beli masyarakat. Dampaknya menghambat investasi pada kedua kabupaten ini. Berbeda dengan indeks terendah pada Kota Mataram memiliki tingkat aktivitas ekonomi lebih dinamis karena masyarakat memiliki daya beli tinggi.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian (Triono et al., 2023) bahwa tingkat daya beli masyarakat belum merata dan factor pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial tersalurkan dengan tepat membuat daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Lebih lanjut (Handrian et al., 2022) bahwa tingkat pendidikan, tenaga kerja, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dengan serempak parsialnya memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wilayah dengan indeks keparahan kemiskinan tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Faktor-faktor utama karena keterbatasan akses Pendidikan, biaya pendidikan yang tinggi dan rendahnya tingkat literasi keuangan.

Dampak jangka panjang kondisi ini adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial dan semakin rendahnya produktivitas tenaga kerja. Indeks keparahan kemiskinan tidak berubah, maka daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi akan menghadapi kesulitan menarik tenaga kerja berkualitas dan mengembangkan sektor ekonomi produktif.

Pernyataan diperkuat dengan hasil penelitian (Masdi et al., 2023) bahwa Upaya untuk mencari investor dan menjaga keamanan stabil dan program pemerintah harus ada peningkatan terhadap sumber daya manusia sehingga nilai IPM lebih meningkat. Lebih lanjut Fuady et al., (2022) menjelaskan bahwa dampak lambatnya proses menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan multidimensi dan mendukung terciptanya kebijakan mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah Indonesia (Prameswari et al., 2021). Secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tenaga Kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan

Tingkat pembangunan daerah di NTB beberapa kabupaten/kota mengalami fluktuasi indeks kemiskinan cukup merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan masih bervariasi. Kebijakan yang berhasil dalam pengentasan kemiskinan pada Kota Mataram dan Kota Bima. Namun kebijakan kedua kota tersebut tentu belum tentu berhasil diterapkan pada daerah lain. Mengingat perbedaan karakteristik social ekonomi dan lingkungan masing-masing daerah.

Intervensi lebih terarah dan berbasis data sangat penting sebagai upaya mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Mengingat indeks tinggi pada kabupaten/kota lebih focus pada program pengembangan ekonomi berbasis komunitas, pemberian modal usaha dan peningkatan akses layanan dasar lebih nyata dibandingkan bantuan sosial konvensional.

Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian Fajri (2022) bahwa tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran sudah menjadi salah satu masalah yang serius (Fariz et al., 2020). Program dana desa yang setiap tahun meningkat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Pendekatan kelembagaan bahwa pasar mengendalikan pertumbuhan dan distribusi ekonomi melalui intervensi pemerintah (Arfi et al., 2023). Pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan,

pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapat yang permanen setiap warga negara sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan (Faujiah et al., 2023).

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data

Pengentasan kemiskinan memiliki tantangan dengan diidentifikasi dan strategi berbasis data. Beberapa pendekatan diperlukan dalam mendukung program pengentasan ditingkat wilayah.

1. Pemetaan Kemiskinan

Pemetaan kemiskinan secara detail menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Mengidentifikasi tingkat kemiskinan masing-masing wilayah secara terperinci dapat merancang program yang lebih tepat sasaran. Kondisi ini dapat dilakukan intervensi khusus pada kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung (Suwarno et al., 2021) pemetaan kemiskinan dengan pendekatan lingkungan sebagai tahapan pengentasan kemiskinan, (Nafisah et al., 2019) penerapan analisis multidimensional scaling pada pemetaan karakteristik kemiskinan, (Redjeki et al., 2014) perancangan sistem identifikasi dan pemetaan potensi kemiskinan untuk optimalisasi program kemiskinan, (Widyawati et al., 2021) penerapan metode ell-counterfactual untuk pemetaan kemiskinan level kecamatan dan desa/kelurahan, dan (Sriliana et al., 2017) pemetaan kemiskinan di kabupaten mukomuko menggunakan small area estimation.

2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Tingkat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di NTB memiliki akses terbatas pada layanan pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kabupaten memiliki tingkat partisipasi sekolah dan akses fasilitas kesehatan rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Meningkatnya akses dan kualitas layanan mampu memutus siklus kemiskinan antar generasi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pernyataan ini diperkuat (Suryani et al., 2019) identifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di pulau lombok: basis perumusan intervensi kebijakan, (Rodiah et al., 2018) model diseminasi informasi komunikasi kesehatan masyarakat pedesaa, (Widyastuti et al., 2023) analisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap akses sanitasi laya, dan (Rohmi et al., 2023) program keluarga harapan (PKH) dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

3. Penguatan Jaringan Pengaman Sosial

Penyediaan bantuan sosial adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Dimana pada tingkat indek keparahan kemiskinan tinggi memiliki langkah penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Program utama melalui bantuan tunai langsung, subsidi pangan dan jaminan Kesehatan. Program ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan didukung data akurat.

Mekanisme penyaluran bantuan harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Pernyataan ini diperkuat hasil penelitian

(Ardianto et al., 2022) membangun resiliensi warga: inisiatif pemerintah desa menciptakan jaring pengaman social, (Supeno, 2011) implementasi kebijakan jaring pengaman sosial-operasi pasar khusus beras keluarga pra sejahtera, (Elizabeth, 2022) perubahan sosial ekonomi dan pengentasan petani kecil rentan melalui bantuan jaring pengaman sosia, dan (Johadi et al., 2023) analisis efek literasi keuangan dan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas UMKM.

Model Pengentasan Kemiskinan Wilayah

Model pengentasan kemiskinan wilayah (Gambar 1) dari berbagai aspek pembangunan mulai dari strategi ekonomi sampai kebijakan. Pendekatan ini secara komprehensif mengatasi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Melalui sinergi antara pertumbuhan industri, perbaikan infrastruktur, perluasan akses Pendidikan, Kesehatan dan keterlibatan komunitas local sebagai alternatif model dalam menjawab tantangan struktural dan kontekstual pengentasan kemiskinan. Dukungan kebijakan dan mekanisme pendanaan. Model ini mampu mengatasi kompleksitas kemiskinan kedalaman dan keparahan dalam mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Model pengentasan kemiskinan wilayah

1. Strategi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sebagai faktor fundamental dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki karakteristik geografis dan social ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi difokuskan pada dua aspek utama: mendorong pertumbuhan industri dan perbaikan infrastruktur. Pertumbuhan industri berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung mengurangi kedalaman kemiskinan. Efektivitasnya bergantung pada keterjangkauan akses masyarakat miskin terhadap sektor industri berkembang.

Perbaikan infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi, energi dan komunikasi. Meningkatkan konektivitas wilayah pedesaan dengan pusat-pusat ekonomi terutama memperluas akses pasar bagi usaha mikro dan kecil. Kendala utama yang sering ditemukan adalah keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya distribusi dan rendahnya daya saing produk lokal. Jika

pembangunan ekonomi tidak disertai dengan strategi. Kelompok miskin berada di daerah terpencil akan tetap terjebak dalam kemiskinan mendalam.

Model ini diperkuat dengan penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pendekatan MARS ensemble memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan MARS pada model kemiskinan (Pintowati et al., 2012; Fadilla, 2018).. Kemiskinan biasanya dipandang sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga, atau sekelompok masyarakat yang mengalami kekurangan khususnya dalam hal rendahnya kualitas kehidupan sosial-ekonomi yang dialami sehari-hari. Secara konseptual, kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori-teori kemiskinan seperti kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan alamiah.

Lebih lanjut (Rusastra, 2011) program pemberdayaan pertanian dan nonpertanian untuk kelompok miskin sudah relatif banyak, namun kurang efektif dan berkelanjutan karena bersifat parsial-sektoral. Mengingat besarnya sumber daya yang dicurahkan, dalam perspektif peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembangunan (Lubis, 2017) kemiskinan merupakan persoalan krusial dalam pembangunan nasional. Terdapat beberapa tipologi kemiskinan dari berbagai perspektif. Sesungguhnya persoalan kemiskinan ini bukan sekedar permasalahan ekonomi, melainkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Oleh karena terdapat relativitas dalam memahami kemiskinan, maka kemiskinan dapat dipahami dan dikategorikan sebagai kemiskinan berdimensi ekonomi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan berdimensi sosial-budaya yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan berdimensi struktural yaitu kemiskinan struktural.

Penerapan model ini berhasil pada negara China. Strategi yang diterapkan pembangunan ekonomi efektif dalam pengentasan kemiskinan melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur skala besar. Sejak tahun 1980-an, kebijakan *Reform and Opening-Up* membuka sektor industri bagi investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi pesat. Pembangunan infrastruktur terutama pada akses jalan, jembatan dan listrik di pedesaan. Kondisi ini untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi local dalam mengurangi angka kemiskinan.

2. Program Kesejahteraan Sosial

Tingkat indeks keparahan kemiskinan sebagai bagian dalam mendukung program kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan daya tahan kelompok rentan terhadap guncangan ekonomi. Model ini menekankan pada inisiatif pendidikan dan akses pelayanan Kesehatan. Pendidikan memiliki efek jangka panjang dalam meningkatkan mobilitas sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi. Tingkat partisipasi pendidikan di tingkat menengah dan tinggi masih tergolong rendah di NTB berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja dan keterbatasan peluang kerja di sektor formal.

Akses terhadap pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan terutama dalam beban ekonomi ditanggung rumah tangga miskin akibat penyakit atau keterbatasan layanan medis. Tingginya angka stunting dan malnutrisi di NTB menunjukkan bahwa perbaikan layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam strategi pengentasan kemiskinan. Program kesejahteraan sosial tidak difokuskan pada kelompok termiskin Dimana keparahan kemiskinan akan tetap

tinggi karena masyarakat miskin tidak memiliki ketahanan cukup terhadap berbagai risiko ekonomi.

Temuan ini didukung (Setiawan, 2017) bahwa puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung yaitu aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi, (Luthfi, 2019) efektifitas bantuan sosial program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan (Lestari et al., 2022) strategi alokasi anggaran bantuan sosial untuk penurunan kemiskinan.

Lebih lanjut berbagai program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan untuk memutus siklus kemiskinan yang terjadi (Supriana et al., 2019). Namun program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah masih belum optimal (Yasir et al., 2021). Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan dan perlindungan sosial termasuk klaster I strategi penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

Model ini berhasil diterapkan pada negara Brasil. Keberhasilan model ini menjadi salah satu contoh sukses dalam implementasi program kesejahteraan sosial melalui kebijakan *Bolsa Família*. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan vaksinasi. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem di Brasil, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota.

3. Keterlibatan Komunitas

Partisipasi komunitas sebagai elemen penting dalam pendekatan berbasis pemberdayaan. Model ini menunjukkan bahwa partisipasi lokal dan program pemberdayaan perempuan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Pendekatan berbasis komunitas sangat relevan mengingat kuatnya struktur sosial dan budaya yang berbasis komunal. Masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sangat efektivitas intervensi dapat meningkat karena lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor kunci dalam pengurangan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, modal usaha, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro memberikan dampak kemiskinan dapat dikurangi secara lebih signifikan.

Pernyataan ini diperkuat (Nugroho, 2023) pemberdayaan dengan mengoptimalkan potensi lokal pada sektor pariwisata, merupakan gerakan yang berdampak pada penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem. Pemberdayaan bisa dilakukan di berbagai tempat, oleh semua pihak, dan dengan modal sosial tersedia. Penelitian ini masih dimungkinkan untuk dilanjutkan dengan menggunakan sudut pandang dan kerangka berpikir yang lebih luas.

Lebih lanjut diperkuat (Nugroho, 2023) bahwa kemiskinan ekstrem menjadi permasalahan di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan anggaran menyebabkan

penyelesaian permasalahan kemiskinan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemberdayaan dari bawah ke atas memungkinkan untuk membangun kemandirian warga negara dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tingkat akar rumput. Wijaya (2015) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk keterlibatan pada kaum miskin. Pertama, kurang lebih terbatas, dalam bentuk kunjungan ke komunitas-komunitas orang miskin, pertemuan-pertemuan, pendampingan terbatas, dukungan terhadap komunitas-komunitas beserta gerakan-gerakan mereka. Kedua, kerja ilmiah, menjalankan penelitian, menyampaikan penalaran profetis, kritis-kreatif, yang didorong oleh keterlibatan praktis berkaitan dengan keprihatinan komunitas

Keberhasilan model ini sudah berhasil dilaksanakan pada Negara Indonesia. Model ini telah mengadopsi pendekatan berbasis komunitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Mandiri dan Dana Desa. Program ini menekankan pada partisipasi lokal dalam pembangunan, termasuk inisiatif yang memperkuat peran perempuan dalam ekonomi desa. Dengan dana desa yang dikelola langsung oleh masyarakat, proyek-proyek pembangunan berbasis kebutuhan lokal dapat direalisasikan, termasuk pengembangan usaha mikro dan infrastruktur dasar.

4. Kelestarian Lingkungan

Aspek kelestarian lingkungan dalam model ini ditekankan melalui praktik pertanian berkelanjutan dan upaya konservasi. Ketergantungan terhadap sektor pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat miskin sangat tinggi, tetapi praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat memperburuk kondisi ekonomi dan ekologis jangka panjang. Degradasi lahan akibat pertanian yang tidak ramah lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sering kali meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, yang berdampak negatif terhadap kelompok miskin.

Upaya konservasi memiliki keterkaitan dengan indeks keparahan kemiskinan. Wilayah dengan tingkat konservasi yang rendah sering kali mengalami bencana ekologi yang lebih tinggi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam strategi pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang bagi kelompok miskin.

Upaya ini diperkuat hasil penelitian (Prabu Aji et al., 2022) pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip pencapaian pembangunan manusia sementara pada fase yang sama mempertahankan sistem alam untuk memberikan masukan bahwa masyarakat bergantung pada alam dan sumber daya didalamnya, (Ezizwita et al., 2024) pola pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, (Global Green Growth Institute, 2015) mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau untuk indonesia yang sejahtera, dan (Wahyudi, 2018) 1) memfasilitasi pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan, perbaikan sistem insentif usaha tani, dan mendorong pengembangan agroindustri padat tenaga kerja di pedesaan, 2) reorientasi arah dan tujuan pengembangan agribisnis padi dengan sasaran peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga petani padi, serta sebagai wahana dinamisasi perekonomian desa, dan 3) pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan), teknologi, permodalan, kebijakan stabilisasi, dan penyuluhan untuk komoditas alternatif nonpadi yang bernilai ekonomi tinggi tetapi memiliki risiko yang besar.

Keberhasilan model ini dilakukan pada negara Kosta Rika. Model ini berhasil mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan pembangunan ekonomi melalui pertanian berkelanjutan dan konservasi ekosistem. Program *Payments for Environmental Services (PES)* memberikan insentif finansial kepada petani dan pemilik tanah untuk menjaga hutan, menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan, dan mengurangi deforestasi. Hasilnya, Kosta Rika tidak hanya mempertahankan kelestarian lingkungannya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di sektor ekowisata dan pertanian organik.

5. Kerangka Kebijakan

Dukungan pemerintah dan mekanisme pendanaan sebagai pilar utama dalam keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Tanpa kebijakan yang jelas dan mekanisme pendanaan efektif dan program-program dirancang untuk mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak akan berjalan optimal. Peran strategis bahwa alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada kelompok paling membutuhkan.

Tantangan utama adanya ketergantungan terhadap dana transfer pusat sering kali tidak disertai dengan fleksibilitas dalam pengalokasian dana sesuai dengan karakteristik kemiskinan lokal. Jika mekanisme pendanaan tidak diarahkan pada program yang berbasis data empiris terkait data kemiskinan maka kebijakan yang dihasilkan akan bersifat umum dan kurang efektif dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang kompleks.

Pernyataan ini diperkuat (Anwar, 2022) bahwa ekonomi hijau sebagai salah satu strategis global yang berkaitan dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terciptanya paradigma terhadap ekonomi hijau dari masyarakat secara metodologis, konseptualisasi, implementasi, dan kritik mengarah kepada tantangan strategi global, (Wahyudi, 2018) kebijakan strategis usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan, dan (Banowati, 2016) pemberdayaan penduduk pesanggem untuk pengentasan kemiskinan dan percepatan pemulihan sumberdaya hutan.

Lebih lanjut (Sunyap et al., 2021) terkait program dan sebagai cakupan pembangunan memungkinkan mengalami pengembangan dan perluasan ke daerah terjauh hingga terisolir. Hal yang sama juga berlaku untuk program anta proyek yang efektivitas dan efisiensinya dapat diwujudkan. (Iqbal et al., 2009) Orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu pembangunan yang bias perkotaan dan diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian, sehingga menyebabkan ketimpangan transfer sumberdaya dari desa ke kota. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesenjangan pendapatan antara masyarakat perdesaan dengan komunitas perkotaan, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan, dan eksploitasi wilayah perdesaan yang cenderung kurang mengindahkan aspek lingkungan.

Keberhasilan model ini berhasil diterapkan pada negara Swedia. Model ini dengan kerangka kebijakan yang kuat dalam pengentasan kemiskinan melalui sistem kesejahteraan negara (*welfare state*). Pemerintah menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan tunjangan sosial yang komprehensif bagi masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa kelompok rentan tetap memiliki akses terhadap layanan dasar, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, berbagai model dan strategi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dilaporkan mampu keluarga secara optimal. Beberapa model dan strategi melalui Pembangunan menyeluruh mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan prasarana pendukung (Sholeh, 2010). Pertumbuhan melalui program transmigrasi dan atau imigrasi (Borisovna*, 2020; “Multidimensional Poverty as a Global Problem of Modern Socio-Economic Development,” 2018; Tomashuk et al., 2022). Selain penerapan berbagai model tersebut, daerah juga harus memiliki visi misi utama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Untuk mencapai target penyelesaian kemiskinan dan ketimpangan ditingkat daerah, kepala daerah harus memiliki pemahaman yang tepat dalam penyelesaian kemiskinan.

Terlepas dari hasil data sekunder diatas, keterbatasan tertentu dari penelitian ini harus diperhatikan. Meskipun data bersumber dari data sekunder dari BPS. Namun penelitian lebih lanjut disarankan untuk melibatkan masyarakat sebagai objek penelitian, sehingga populasi semakin heterogen dan mengetahui secara langsung factor penyebab kemiskinan.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dinamika Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan di NTB. Kondisi ini disparitas kemiskinan antarkabupaten/kota masih tinggi. Kabupaten Lombok Utara memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi mencapai tingkat kedalaman mencapai 6.08 Tahun 2022 dan keparahan kemiskinan tertinggi mencapai 1.97 Tahun 2022. Kondisi ini karena di pengaruhi faktor akses geografis, infrastruktur dan bencana gempa dan Covid-19. Kota Mataram memiliki indeks kedalaman terendah mencapai 0.93 Tahun 2021 dan indeks keparahan mencapai 0.19 Tahun 2021. Diperlukan kebijakan pembangunan berbasis data dan berfokus penguatan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan peningkatan akses Pendidikan, kesehatan menekan angka kemiskinan lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan Bps Tahun 2022. *Journal Of Society Bridge*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>.
- Aji, S. P., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal Of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>.
- Alfiah, A., Mustakim, M., Naskah, N., Nuryanti, N., & Salmiah, S. (2020). Kontribusi Perempuan Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai Bengkalis. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1), 92. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.9633>.
- Alwi, M., Karismawan, P., Yudha S, I. D. K., & Harsono, I. (2022). Sarana Pendidikan, Kesehatan Dan Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Tanjung Sebagai Pusat Pertumbuhan Kabupaten Lombok Utara, Paska Gempa 2018 Dan Masa Pandemi Covid-19. *Ganec Swara*, 16(2), 1616. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.327>.

- Andalisto, D., Saragih, Y., & Ibrahim, I. (2022). Analisis Kualitatif Teknologi 5g Pengganti 4g Di Indonesia. *Jurnal Edukasi Elektro*, 6(1), 01–09. <https://doi.org/10.21831/jee.v6i1.47021>.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1s), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpsektif Pendidikan Multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.
- Apriliani, A. R. (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan Di Provinsi Aceh (Unemployment Effect Of Poverty Gap Index In Aceh Province). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8, 73–81.
- Aprilianti, V. A., & Harkeni, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i2.111>.
- Ardianto, H. T., Martini, R., Wijayanto, W., & Prameswari, Y. P. (2022). Membangun Resiliensi Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 349–368. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.349-368>.
- Arfi, A. P. S., Yulhendri, & Magriasti, L. (2023). Perspektif Ekonomi Islam Dalam Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2(3), 99–108. <https://doi.org/10.53867/jea.v2i3.75>.
- Astari, M., Nuada, I. W., Rosida, L., & Supriyadi, E. (2021). Strategi Pegawai Di Industri Perhotelan Berbintang Gili Trawangan Dalam Penanganan Krisis Sosial Ekonomi Selama Pandemi Covid-19. *Journal Of Responsible Tourism*, 1(2), 141–146. <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i1.1001>.
- Astri, L. P. V., Hartati, S., & Taufik, M. Z. (2022). Strategi Menghadapi Pergeseran Perekonomian Pasca Bencana Gempa Lombok Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2208>.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Badan Pusat Statistik - Kemiskinan Dan Ketimpangan*, 05, 3–7.
- Banowati, E. (2016). Pemberdayaan Penduduk Pesanggem Untuk Pengentasan Kemiskinan Dan Percepatan Pemulihan Sumberdaya Hutan Muria. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 16(2), 39–46. <https://doi.org/10.21009/spatial.162.05>.
- Borisovna, B. N. (2020). Overcoming Of Poverty And Inequality As Condition Of Steady Social Development Of Regions. *International Journal Of Recent Technology And Engineering (Ijrte)*, 9(1), 1418–1426. <https://doi.org/10.35940/ijrte.a2424.059120>.
- Budiman, S., & Liong, Y. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber

- Daya Lokal. *Khaliya Onomiyea: Jurnal Abdimas Nusantara*, 1(2), 60–73. <https://doi.org/10.61471/ko-jan.v1i2.20>.
- Damara, D., Yuniarti, D., & Wasono. (2019). Pemodelan Persentase Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur Menggunakan Analisis Regresi Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Statistika*, 164–171.
- Elizabeth, R. (2022). Perubahan Sosial Ekonomi Dan Pengentasan Petani Kecil Rentan Melalui Bantuan Jaring Pengaman Sosial Di Masa Pandemi Covid19. *Journal Of Sciencetech Research And Development*, 4(1), 001–015. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v4i1.39>
- Ezizwita, E., Srihasnita, R., Maivalinda, M., Firsta, F., Putri, N. H., & Zetri, R. (2024). Pola Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(1), 13–27. <https://doi.org/10.47233/jebd.v26i1.1301>.
- Fadilla, A. (2018). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 38–47. <https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.46>.
- Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>.
- Fariz, R. F., Subarkah, S., & Sulistyowati, S. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Penetapan Apbdesa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), 87–96. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5685>.
- Faujiah, & Arifuddin. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Miskin Di Indonesia. *Jurnal Lentera: Jurnal Studi Pendidikan*, 5(1), 135–146. <https://doi.org/10.51518/lentera.v5i1.104>.
- Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Tataloka*, 24(4), 330–337. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337>.
- Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Untuk Indonesia Yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1–21.
- Handrian, O. S., & Indrajaya, I. G. B. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja, Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(3), 887. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i03.p04>.
- Ibrahim, I, Baiquni, M., Ritohardoyo, S., & Setiadi, S. (2016a). Analysis Of The Factors Affecting The Poverty In Rural Areas Around Gold Mine Areas In West Sumbawa Regency. *Journal Of Degraded And Mining Lands Management*, 3(3), 585–594. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2016.033.585>.

- Ibrahim, Baiquni, M., Ritohardoyo, S., & Setiadi. (2016b). Characteristics Of Poverty In Rural Communities Of Gold Mining District Area West Sumbawa. *Mimbar*, 32(1), 163–174.
- Ibrahim, Mintasrihardi, Kamaluddin, Mas'ad, & Syukuriadi. (2020). Community Empowerment Pattern Through Village-Owned Enterprise Strategy In The Gold Mine Area Of West Sumbawa, Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/413/1/012036>.
- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rasanjani, S. (2023). Efektifitas Program Rumah Layak Huni Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Sosio Konsepsia*, 12(2), 37-50. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3240>.
- Iqbal, M., & Anugrah, S. (2009). Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(2), 169–188.
- Islami, D. N., & Pratiwi, F. H. (2024). Analisis Hukum Tentang “Beban” Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 6(2), 277–294. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11125>.
- Johadi, J., Widyantara, G., & Djoko Waluyo, Y. R. (2023). Analisis Efek Literasi Keuangan Dan Jaring Pengaman Sosial Terhadap Aktivitas Umkm Di Kota Surakarta. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 77–90. <https://doi.org/10.35829/magisma.v11i1.281>.
- Kamaluddin. (2017). Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya. In *Gema Eksos* (Vol. 5, Issue 1).
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Bharanomics*, 1(2), 75–81. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156>.
- Laili Rohmi, M., Pratiwi, D., & Alifa Ramadhani, A. (2023). Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi & Bisnis*, 22(2), 166–177. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i2.6307>.
- Lestari, M., Harianto, H., & Falatehan, A. F. (2022). Strategi Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Untuk Penurunan Kemiskinan Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)*, 10(2), 745. <https://doi.org/10.24843/jma.2022.v10.i02.p03>.
- Letor, R. P. (2021). Policy Entrepreneurs Dan Jaringan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Era Desentralisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1526>.

- Liu, W., Li, J., & Zhao, R. (2023). The Effects Of Rural Education On Poverty In China: A Spatial Econometric Perspective. *Journal Of The Asia Pacific Economy*, 28(1), 176–198. <https://doi.org/10.1080/13547860.2021.1877240>.
- Lubis, H. (2017). Mengentaskan Kemiskinan: Multidimensional Approach. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901>.
- Luthfi, M. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kbb). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>.
- Madonna, M. (2021). Pengembangan Jejaring Bisnis Berbasis Media Digital Sebagai Resiliensi Perempuan Demi Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Develop: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 100–108. <https://doi.org/10.53990/djep.v1i2.66>.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>.
- Masdi, M., Yuniza, N., & Nurkhalis, N. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1). <https://doi.org/10.22373/jep.v14i1.781>.
- Maura Shifa Salsa Nabilla, & Ima Amaliah. (2024). Pengaruh Pengguna Telepon Seluler, Fasilitas Kesehatan Dan Sanitasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2010-2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 294–300. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.11786>.
- Medeiros, V., Ribeiro, R. S. M., & Amaral, P. V. M. Do. (2021). Infrastructure And Household Poverty In Brazil: A Regional Approach Using Multilevel Models. *World Development*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105118>.
- Muhammad Alwi, Putu Karismawan, & I Dewa Ketut Yudha S. (2021). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Saat Ini Dan Di Masa Depan Dalam Upaya Pengurangi Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal Of Economics And Business*, 7(1), 66–81. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.69>.
- Muhammad Alwi, Putu Karismawan, Yudha S, I. D. K., & Iwan Harsono. (2022). Kecamatan Tanjung Sebagai Pusat Pertumbuhan Dan Jumlah Penduduk Miskin Yang Tertinggi Di Kabupaten Lombok Utara. *Journal Of Economics And Business*, 8(1), 27–44. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.91>.
- Muhtarom, A. (2015). Kualitas Pendidikan Sebagai Motor Pengerak Perekonomian Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Ekbis*, 14(2), 10. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v14i2.123>.
- Multidimensional Poverty As A Global Problem Of Modern Socio-Economic Development. (2018). *Social Economics*, 55. <https://doi.org/10.26565/2524-2547-2018-55-7>.

- Mustofa. (2012). Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Dan Modal Sosial Di Provinsi Diy. *Jurnal Geomedia*, 10(1), 1–5.
- Nafisah, S., & Setiawan, T. H. (2019). Penerapan Analisis Multidimensional Scaling Pada Pemetaan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Statmat : Jurnal Statistika Dan Matematika*, 1(2). <https://doi.org/10.32493/sm.v1i2.2946>.
- Nasution, Z. (2012). *Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan “Leleang Lebak Lebung” Dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)*. Disertasi. Bogor. IPB University.
- Nugroho, D. (2023). Keterlibatan Komunitas Dalam Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Membangun Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v3i2.117>.
- Pillay-van Wyk, V., & Bradshaw, D. (2017). Mortality And Socioeconomic Status: The Vicious Cycle Between Poverty And Ill Health. In *The Lancet Global Health* (Vol. 5, Issue 9, Pp. E851–E852). [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(17\)30304-2](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(17)30304-2).
- Pintowati, W., & Otok, B. W. (2012). Pemodelan Kemiskinan Di Propinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Multivariate Adaptive Regression Splines Ensemble. In *Jurnal Sains Dan Seni Its* (Vol. 1, Issue 1, Pp. D283–D288).
- Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 7(2), 75. <https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.909>.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/Focus.V5i1.39965>.
- Priyarsono, D. S., Wijaya, M. B., & Sigiro, E. E. (2023). Determinan Kesenjangan Kemiskinan Desa-Kota Di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(2), 186. <https://doi.org/10.22146/mgi.80932>.
- Puspaningtyas, L., Afifi, M., & Ismiwati, B. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan Dan Kurs Rupiah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Ntb Tahun 2005-2021. *Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i1.695>.
- Putra, H. P., Diaudin, M., Fahrudin, R., & Suwanan, A. F. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio Dan Pertumbuhan Pdrb Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan Di Kota Blitar Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 18(2), 152–161. <https://doi.org/10.21831/jep.v18i2.45888>.
- Redjeki, S., Guntara, M., Anggoro, P., Informatika, J. T., & Yogyakarta, S. A. (2014). Perancangan Sistem Identifikasi Dan Pemetaan Potensi Kemiskinan Untuk Optimalisasi Program Kemiskinan. *Issn Print*, 6(2), 2085–1588.

- Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, A. S. (2018). Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.17771>.
- Rusastra, I. W. (2011). Reorientasi Paradigma Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 4(2), 87–102.
- Sari, R. K., Despa, D., & Sukmana, I. (2022). Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah. *Jurnal Rekayasa Lampung*, 1(3). <https://doi.org/10.23960/jrl.v1i3.15>.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>.
- Sholeh, M. (2010). Kemiskinan : Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya. *Universitas Stuttgart*, 1–16.
- Simbolon, T. R. (2017). Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sumatera. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(4), 30–46.
- Sriliana, I., Agustina, D., & Sunandi, E. (2017). Pemetaan Kemiskinan Di Kabupaten Mukomuko Menggunakan Small Area Estimation Dengan Pendekatan Regresi Penalized Spline. *Jurnal Matematika Integratif*, 12(2), 59. <https://doi.org/10.24198/jmi.v12.n2.11929.59-67>.
- Sunyp, Y., Hamka, H., & Bahri, S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bonmela Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 91–93. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.396>.
- Sutanto, H. (2017). Dilema Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara. *Journal Of Economics And Business*, 3(1), 29–43. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v3i1.4>.
- Supeno, E. (2011). Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial-Operasi Pasar Khusus Beras (Jps-Opkb) Keluarga Pra Sejahtera. *Journal Unair*, 1(1), 1–10.
- Supriana, I. W., & Astuti, L. G. (2019). Implementasi K-Nearest Neighbor Pada Penentuan Keluarga Miskin Bagi Dinas Sosial Kabupaten Tabanan. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 5(1). <https://doi.org/10.36002/jutik.v5i1.645>
- Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi Karakteristik Dan Profil Kemiskinan Di Pulau Lombok: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i1.28>.
- Suryati, D., & Salkiah, B. (2019). Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pada Umkm Di Kota Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 13(12), 1823. <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i12.266>.
- Susila, A. R. (2013). Analisis Sebaran Kemiskinan Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia*.

- Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. B. (2021). Pemetaan Kemiskinan Dengan Pendekatan Lingkungan Sebagai Tahapan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Kediri. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2290>.
- Suzuki, Y., Pramono, S., & Rufidah, R. (2016). Islamic Microfinance And Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Findings From Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 63. <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.910>.
- Syahza, A., & Suarman, S. (2018). Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(3), 365–386. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154>.
- Tomashuk, I., & Baldynyuk, V. (2022). International Labor Migration In The Context Of Geo-Economic Transformation. *Three Seas Economic Journal*, 3(1), 203–216. <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-29>.
- Usman, S. (1994). Dimensi Struktural Kemiskinan. *Unisia*, 14(21), 34–35. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol14.iss21.art3>
- Wahidin, Yuniarti, T., & Astuti, E. (2022). Kajian Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten/Kota Dan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 14–24. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i1.53>.
- Wahyudi, K. D. (2018). Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 11(2). <https://doi.org/10.37849/midi.v11i2.15>.
- Widyastuti, D., Jamaluddin, H. N., Arisanti, R., & Kartiasih, F. (2023). Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Akses Sanitasi Layak Di Indonesia Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 105–116. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1853>.
- Widyawati, D., & Muchlisoh, S. (2021). Penerapan Metode Ell-Counterfactual Untuk Pemetaan Kemiskinan Level Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 806–816. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.522>.
- Wijaya, H. (2015). Kemiskinan Dan Kelaparan: Berbagai Pandangan Dengan Perspektif Yang Berbeda. In https://www.researchgate.net/publication/282854625_Kemiskinan_Dan_Kelaparan_Berbagai_Pandangan_Dengan_Perspektif_Yang_Berbeda. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4948.0408>.
- Winardi. (2017). *Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Barat*. Disertasi. Bogor: IPB University.
- Yasir, A., Sukmawati, U. S., Iva Ashari Ananda, & Karisma. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian*

Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 7(2), 1–16.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.405>.

Zhou, Y., & Liu, Y. (2022). The Geography Of Poverty: Review And Research Prospects. *Journal Of Rural Studies*, 93, 408–416.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.008>.